

KAJIAN PEMBANGUNAN SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN SUB KEGIATAN PEMETAAN PARTISIPATIF KELURAHAN

M. Anis Januar

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kota Malang

Email: yayan.yanuar@malangkota.go.id

Abstrak: Peta merupakan penyajian grafis bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan dan yang diwakili. Selain itu, peta merupakan gambar permukaan bumi pada bidang datar dalam ukuran yang lebih kecil. Metode yang digunakan adalah metode kompilasi data awal, metode persiapan survei, metode survey primer, metode survei sekunder dan metode menggambar dan manipulasi/editing data dalam aplikasi GIS. Tujuannya untuk menggambarkan secara umum kegiatan pemetaan partisipatif di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, Blimbing dan Lowokwaru agar terlaksana dengan baik terutama kegiatan survei lapangan untuk mengakuisisi dan mengenali batas wilayah di masing-masing kecamatan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berupa pemetaan secara partisipatif wilayah Kecamatan Klojen, Blimbing dan Lowokwaru. Kegiatan ini juga mampu membangun pemahaman bersama masyarakat mengenai arti penting batas wilayah kecamatan maupun kelurahan, sehingga diharapkan mampu membendung adanya konflik horisontal yang disebabkan oleh perselisihan batas wilayah.

Kata kunci: Pembangunan, Pengembangan Wilayah, Pemetaan Partisipatif

Abstract: Map is a graphical representation of the shape of space and the relationship between various embodiments and those represented. The method used is the initial data compilation, survey preparation methods, primary survey methods, secondary survey methods and data drawing and manipulation/editing methods in GIS applications. In general, participatory mapping activities in three sub-districts, namely Klojen, Blimbing and Lowokwaru Subdistricts have been implemented well, especially in field survey activities to acquire and recognize boundaries in each sub-district. The final results obtained from this activity were in the form of a map of the Klojen, Blimbing and Lowokwaru Subdistricts based on participatory mapping. More than that, this activity is also able to build a common understanding of the community regarding the importance of the boundaries of the sub-districts and villages, so that it is expected to stem the existence of horizontal conflicts caused by regional boundary disputes.

Keywords: Development, Regional Development, Participatory Mapping

PENDAHULUAN

Peta merupakan penyajian grafis bentuk ruang dan hubungan keruangan antara berbagai perwujudan dan yang diwakili. Menurut Prihandito (1998), peta merupakan gambar permukaan bumi pada bidang datar dalam ukuran yang lebih kecil. Dalam hal ini posisi titik-titik pada peta ditentukan terhadap sistem siku-siku x dan y, sedangkan posisi titik-titik pada muka bumi ditentukan oleh lintang dan bujur. Pemetaan dapat diartikan sebagai proses terpadu yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan visualisasi dari data keruangan (Wibowo, 2009). Sedangkan peta dapat berupa gambaran permu-

kaan bumi yang menggambarkan lokasi suatu tempat dan memiliki topik tersendiri (Flavelle, 2001). Proses pemetaan partisipatif tidak berbeda dengan proses pemetaan, yang membedakan hanyalah teknik yang digunakan dan sumber daya yang melakukan. Pengambilan data dan informasi di lapangan yang melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat desa sebagai perencanaan dan pemberi informasi disebut sebagai pemetaan secara partisipatif. Pemetaan partisipatif menurut Hidayat, dkk. (2005) yaitu suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya, sekaligus

juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri.

Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat/wilayah di mana mereka hidup (Hapsari & Cahyono, 2014). Karena masyarakat yang hidup dan bekerja di tempat itulah yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayahnya. Jadi, hanya mereka yang bisa membuat peta secara lengkap dan akurat mengenai sejarah, tata guna lahan, pandangan hidup, dan harapan masa depan. Manfaat pemetaan partisipatif bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Peta bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain, karena dengan peta tersebut menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja yang berhak atas wilayah itu. Proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, pranata hukum setempat, identifikasi sumber daya alam yang dimiliki, dan sebagainya (Hapsari & Cahyono, 2014).

Menurut Hidayat, dkk. (2005) ciri-ciri pemetaan partisipatif adalah melibatkan seluruh anggota masyarakat, proses pemetaan dan peta yang dihasilkan bertujuan untuk kepentingan masyarakat, sebagian besar informasi yang terdapat dalam peta berasal dari pengetahuan masyarakat setempat sehingga akan lebih akurat.

Kota Malang telah memiliki Peta Dasar skala 1:5000 yang merupakan kumpulan Data Geospasial (DG) yang diperoleh menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa. Instrumentasi ukur dan/atau rekam yang diperoleh harus mengacu pada referensi geografis yang telah ditetapkan sebagai standar posisi suatu obyek di permukaan bumi. Ke depan Pemerintah Kota Malang

akan mengembangkan data spasial dengan skala besar, dengan unit data kelurahan, yang salah satu datanya berasal dari pemetaan partisipatif.

Dari pemetaan partisipatif ini juga akan membantu Pemerintah Kota Malang untuk membuat peta berskala besar misalnya 1:5000. Pemetaan partisipatif merupakan cara alternatif dalam rangka penyediaan informasi spasial. Dengan adanya perundangan-undangan yang mengatur, maka masyarakat desa dapat berpartisipasi dalam pembuatan peta di desa mereka sendiri. Karena selama ini peta menjadi acuan tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

METODE

Metodologi Kompilasi Data Awal

Data peta merupakan data sekunder yang seharusnya telah tersedia di awal pekerjaan, untuk kemudian diolah dan dapat dijadikan sebagai data survey lapangan. Data peta digital telah memiliki layer batas Kelurahan hasil pelaksanaan digitasi dari foto satelit, tetapi dengan tingkat kedetailan yang data yang harus dianalisa lagi. Untuk itu perlu dilakukan editing terhadap data peta yang sudah ada.

Metode Persiapan Survei

Kegiatan persiapan survei dilakukan sebagai langkah awal sebelum survei pengambilan data dilakukan. Kegiatan persiapan survei ini yang terdiri dari 2 langkah persiapan, yaitu persiapan dasar dan persiapan teknis survei. Langkah persiapan dasar dilakukan sebagai kegiatan persiapan yang berkaitan dengan masalah administrasi dan perbekalan survei, kegiatan persiapan teknis survei dilakukan sebagai langkah untuk mempersiapkan teknis-teknis pelaksanaan kegiatan survei pengambilan data, baik data sekunder maupun data primer.

Metode Survey Primer

Kegiatan ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mendapatkan "*data primer*". Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui kegiatan pengukuran, pengamatan lang-

sung (*observasi*) atau dari penggalian nara sumber melalui interview. Oleh karena itu kegiatan pengambilan data primer lazim disebut dengan *Survei Lapangan*.

Metode Survei Sekunder

Kegiatan *survei instansional* untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan mendatangi kantor dinas, badan, dan berbagai instansi lain yang terkait dengan pekerjaan ini, untuk mendapatkan data pendukung dalam bentuk buku terbitan, data tertulis dan atau peta yang dimiliki oleh dinas/badan/instansi tersebut, dengan cara menyalin/mencatat atau memfotocopy data yang dibutuhkan tersebut. Dalam pelaksanaan survei instansional juga dapat dilakukan wawancara dengan nara sumber di kantor tersebut yang dapat memberikan informasi langsung tidak tertulis mengenai kondisi lokasi pemetaan.

Metode Menggambar dan Manipulasi/Editing Data dalam Aplikasi GIS

Berdasarkan data yang telah terkumpul, dilakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut: Pengelompokan data dan manajemen penyimpanan data, pengolahan data, gigitasi dan manipulasi/editing peta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

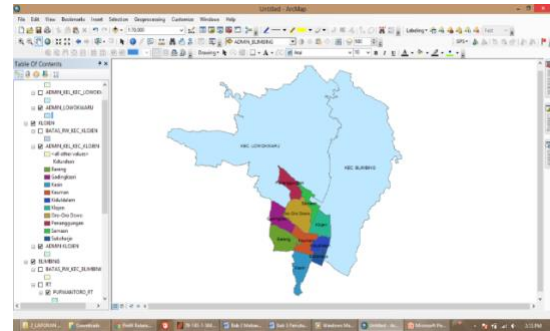
Hasil pemetaan yang diperoleh dari survey lapangan dan pengolahan data pada tiga kecamatan yaitu kecamatan Klojen, Lowokwaru, dan Blimbing adalah sebagai berikut:

A. Kecamatan Klojen

Kecamatan Klojen memiliki 11 kelurahan dengan 81 RW dan 630 RT. Batas-batas wilayah kecamatan Klojen yaitu di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Lowokwaru dan Blimbing, sebelah timur dengan kecamatan Kedungkandang, sebelah selatan dengan kecamatan Sukun, dan sebelah barat dengan kecamatan Sukun dan Lowokwaru.

Hasil dari survey lapangan pada Kecamatan Klojen terdapat perubahan di beberapa kelurahan, di antaranya perubahan wilayah di Kelurahan Bareng,

Samaan, Oro-Oro Dowo, Penanggungan, Rampal Celaket, Sukoharjo dan Kauman.



Gambar 1. Batas Pemetaan Partisipatif Kecamatan Klojen

Proses pemetaan di kecamatan Klojen dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya:

1. Pemetaan Batas Wilayah

Kecamatan Klojen memiliki tingkat pemerintah terendah hingga RT sehingga penentuan batas wilayah merupakan hal yang pertama dilakukan. Kesepakatan di dalam kecamatan, kelurahan, RT, RW dan wilayah yang berbatasan menjadi kunci utama pada proses ini. Batas wilayah adalah tanda pemisah antar unit regional (wilayah) geografi yang bersebelahan. Secara fisik tanda pemisah tersebut dapat berupa fenomena alam, seperti sungai dan punggung bukit atau tanda buatan manusia seperti tugu/pilar dan jalan.

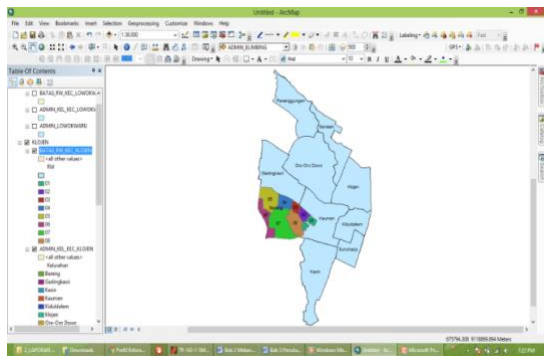
Pemetaan batas wilayah dilakukan pada tingkat kelurahan, RT dan RW. Adapun Penjelasan pada masing-masing kelurahan di antaranya Kelurahan Bareng, Samaan, Oro-oro Dowo, Penanggungan, Rampal Celaket, Sukoharjo dan Kauman.

a. Kelurahan Bareng

Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 74 RT (Rukun Tangga). Penduduknya berjumlah 18.465 orang yang terdiri dari 3.681 KK (Kepala Keluarga).

Pada gambar dibawah ini adalah hasil digitasi batas wilayah kelurahan Bareng yang telah disepakati dan terkoreksi pada

saat sosialisasi, survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan.

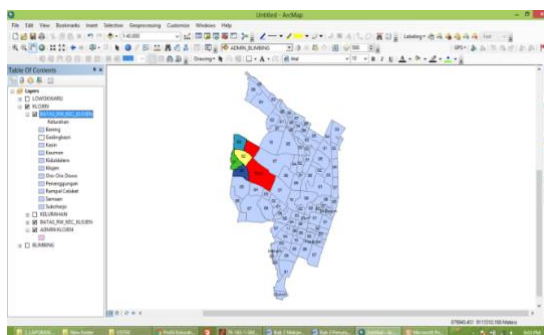


Gambar 2. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Bareng

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Bareng terdapat perubahan, yaitu dari Kelurahan Kauman RT 04 RW 08 saat ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Bareng.

b. Kelurahan Gadingkasri

Kelurahan ini terdiri dari enam RW (Rukun Warga) dan 50 RT (Rukun Tetangga). Penduduknya berjumlah 14.175 orang yang terdiri dari 2.975 KK (Kepala Keluarga).



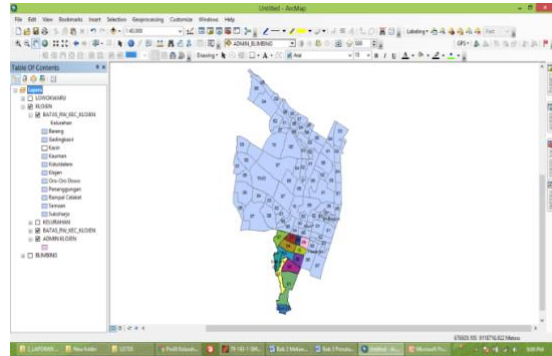
Gambar 3. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Gadingkasri

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Gadingkasri tidak ada perubahan batas wilayah.

c. Kelurahan Kasin

Kelurahan ini terdiri dari 11 RW (Rukun Warga) dan 96 RT (Rukun Tetangga). Penduduknya berjumlah

15.780 orang yang terdiri dari 7.515 pria dan 8.265 wanita.

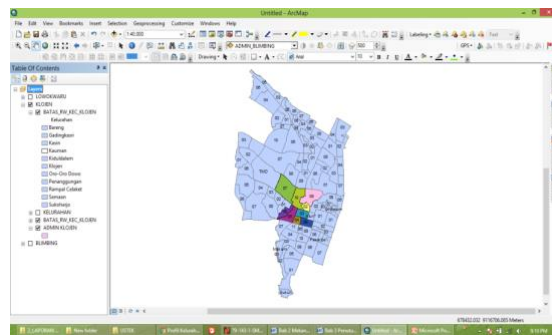


Gambar 4. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Kasin

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Kasin terdapat penambahan batas wilayah yang disebabkan oleh adanya sebuah pemakaman umum yang baru dipetakan, kemudian dimasukkan kedalam RW 03.

d. Kelurahan Kauman

Kelurahan ini terdiri dari 10 RW (Rukun Warga) dan 67 RT (Rukun Tetangga).

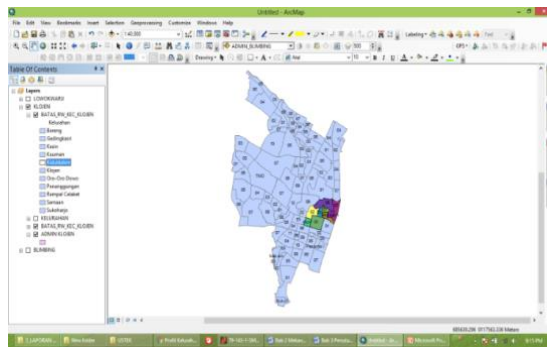


Gambar 5. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Kauman

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Kauman terdapat perubahan yaitu pada RT 04 RW 08 saat ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Bareng.

e. Kelurahan Kiduldalem

Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 50 RT (Rukun Tetangga).

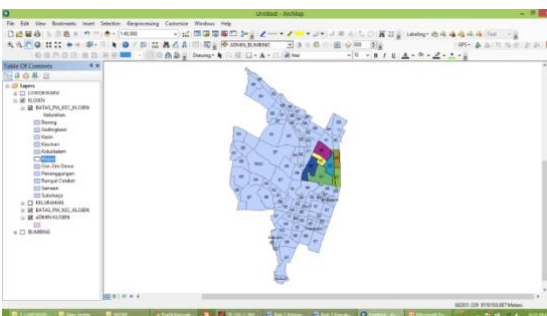


Gambar 6. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Kiduldalem

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Kiduldalem tidak ada perubahan batas wilayah.

f. Kelurahan Klojen

Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 46 RT (Rukun Tetangga).

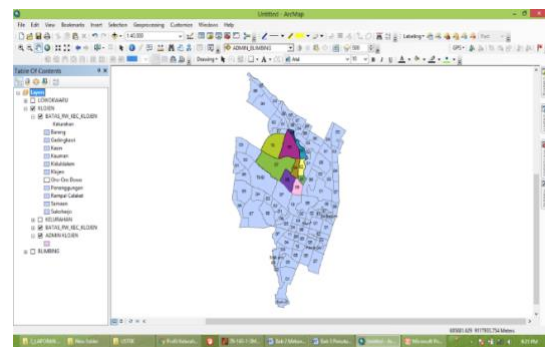


Gambar 7. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Klojen

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Klojen tidak ada perubahan batas wilayah.

g. Kelurahan Oro-Oro Dowo

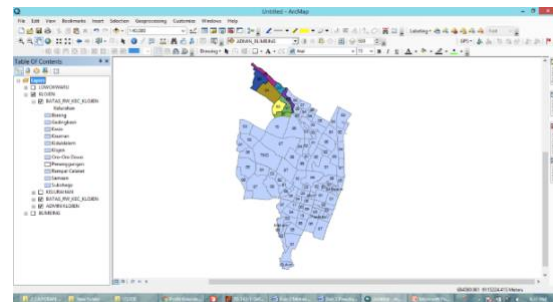
Kelurahan ini terdiri dari 10 RW (Rukun Warga) dan 97 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Oro-oro Dowo terdapat perubahan batas wilayah yaitu pada RT 04 RW 10 saat ini masuk ke dalam wilayah Kelurahan Penanggungan.



Gambar 8. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Oro-oro Dowo

h. Kelurahan Penanggungan

Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 45 RT (Rukun Tetangga).

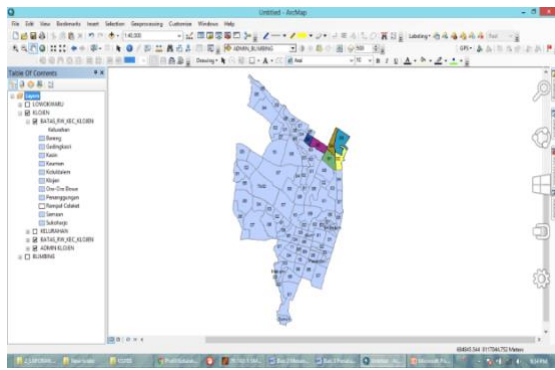


Gambar 9. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Penanggungan

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Penanggungan terdapat perluasan batas wilayah yaitu dari RT 04 RW 10 kelurahan Oro-oro Dowo saat ini masuk ke dalam wilayah Kelurahan Penanggungan.

i. Kelurahan Rampil Celaket

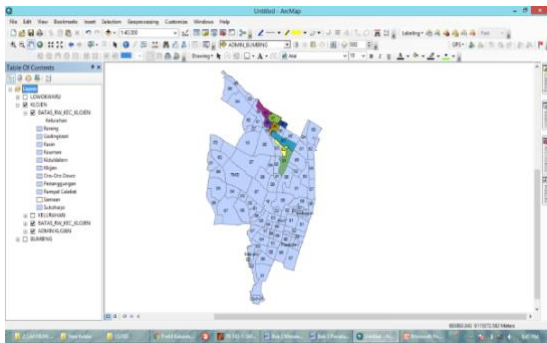
Kelurahan ini terdiri dari enam RW (Rukun Warga) dan 35 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Rampil Celaket terdapat perluasan batas wilayah pada RW 04 dan RW 03 kemudian juga dari kelurahan Samaan yaitu pada RW 05 dan RW 06 saat ini masuk kedalam kelurahan Rampil Celaket .



Gambar 10. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Rampal Celaket

j. Kelurahan Samaan

Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 58 RT (Rukun Tetangga).

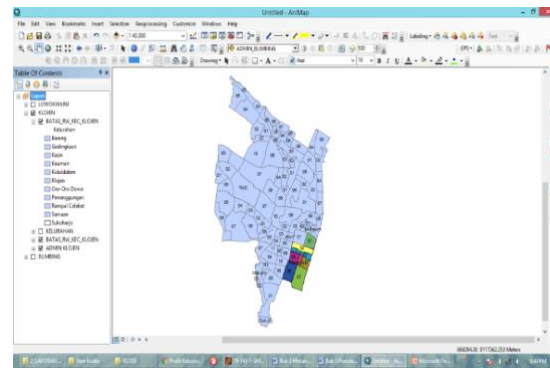


Gambar 11. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Samaan

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Samaan terdapat perubahan, yaitu saat ini pada RW 05 dan RW 06 masuk kedalam kelurahan Rampal Celaket dan batas wilayah Kecamatan Blimbing.

k. Kelurahan Sukoharjo

Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 57 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Sukoharjo terdapat perluasan batas wilayah pada RW 06 dan RW 07.



Gambar 12. Batas Pemetaan Partisipatif Di Kelurahan Sukoharjo

2. Menandai Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Toponimi) Kecamatan Klojen

Kegiatan survei toponimi ini bersifat detail dan dilakukan untuk mendapatkan berbagai dukungan data dan informasi yang akurat secara langsung di lokasi pekerjaan. Data titik (toponimi) dapat mewakili simbol-simbol buatan manusia seperti fasilitas social, umum, Olahraga, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan lain-lain.

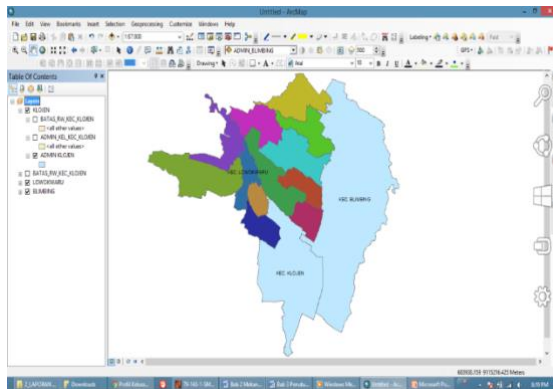
Pada tabel di bawah ini adalah jumlah point pada masing-masing kelurahan di kecamatan Klojen, jumlah titik toponimi terbanyak terdapat di kelurahan Kasin yaitu 183 titik sedangkan yang paling sedikit di kelurahan Samaan yaitu 52 titik. Jumlah keseluruhan titik toponimi di kecamatan ini yaitu 1201 titik.

Tabel 1. Jumlah Point pada Kelurahan di Kecamatan Klojen

No	Kelurahan	Jumlah Point Toponimi
1	Bareng	88
2	Gadingkasri	71
3	Kasin	183
4	Kauman	167
5	Kiduldalem	62
6	Klojen	98
7	Oro-Oro Dowo	103
8	Penanggungan	112
9	Rampal Celaket	120
10	Samaan	52
11	Sukoharjo	145
Jumlah		1201

B. Kecamatan Lowokwaru

Kecamatan Lowokwaru memiliki total 12 kelurahan, 120 RW dan 785 RT. Secara administratif, di sebelah utara, Kecamatan Lowokwaru berbatasan langsung dengan Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Blimbing. Sementara di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Klojen. Lalu, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.



Gambar 13. Batas Pemetaan Partisipatif Kecamatan Lowokwaru

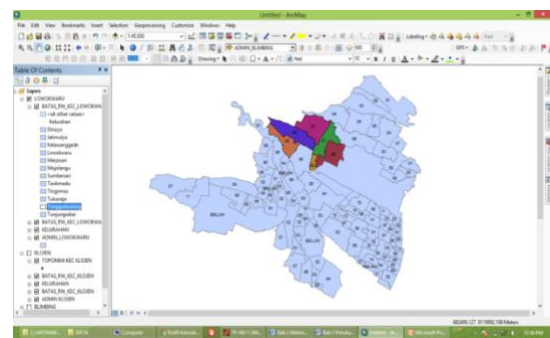
Hasil dari survey lapangan pada kecamatan Lowokwaru terdapat perubahan di beberapa kelurahan, di antaranya perubahan batas wilayah di Kelurahan Jatimulyo, Tunjungsekar dan Tulusrejo.

Proses pemetaan di kecamatan Lowokwaru dilakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya:

1. Pemetaan Batas Wilayah

a. Kelurahan Tunggulwulung

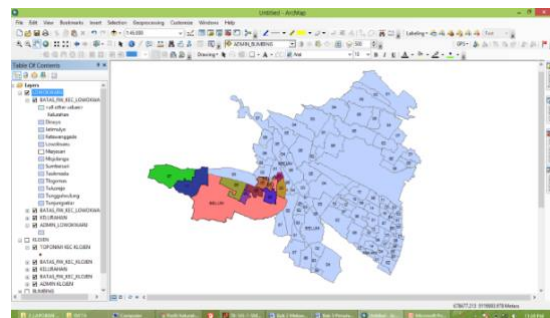
Kelurahan ini terdiri dari enam RW (Rukun Warga) dan 54 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Tunggulwulung terdapat batas wilayah kabupaten yang seharusnya masuk ke dalam RW 04 dan RW 05, tetapi pihak terkait tidak dapat melakukan perubahan batas wilayah tersebut, dikarenakan harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Malang.



Gambar 14. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Tunggulwulung

b. Kelurahan Merjosari

Kelurahan ini terdiri dari 12 RW (Rukun Warga) dan 81 RT (Rukun Tetangga).

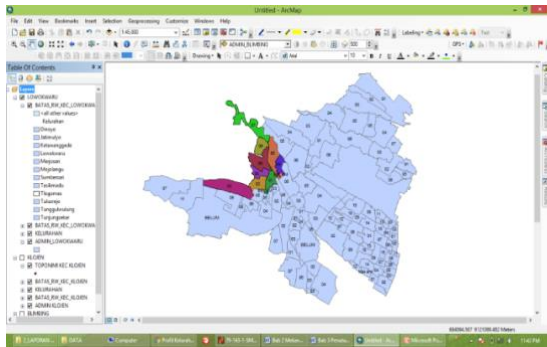


Gambar 15. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Merjosari

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Merjosari terdapat perubahan batas wilayah, yaitu pada sebelah selatan kelurahan terdapat wilayah berupa tanah kosong yang seharusnya masuk kedalam kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun.

c. Kelurahan Tlogomas

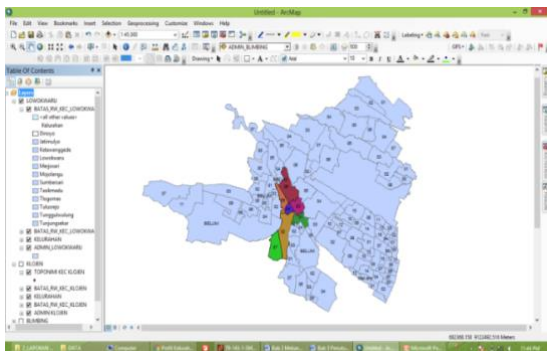
Kelurahan ini terdiri dari sembilan RW (Rukun Warga) dan 49 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Tlogomas tidak ada perubahan batas wilayah.



Gambar 16. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Tlogomas

d. Kelurahan Dinoyo

Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 51 RT (Rukun Tetangga).

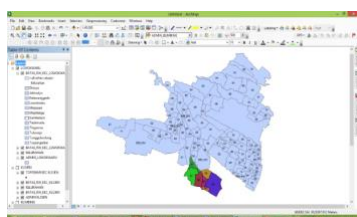


Gambar 17. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Dinoyo

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Dinoyo terdapat penambahan area dari sebagian wilayah yang ada di Kelurahan Ketawanggede yang dimasukkan kedalam RW 02 yaitu wilayah yang terletak di sekitar Jl. Gajayana.

e. Kelurahan Sumpersari

Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 40 RT (Rukun Tetangga).

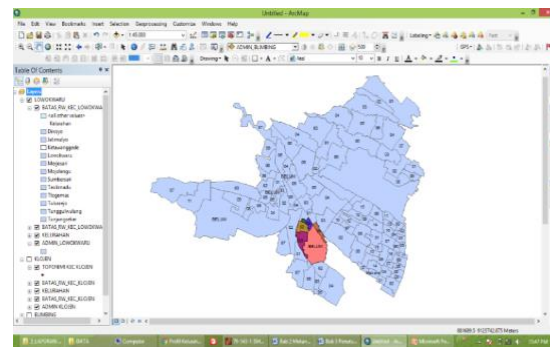


Gambar 18. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Sumpersari

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Sumpersari tidak ada perubahan batas wilayah.

f. Kelurahan Ketawanggede

Kelurahan ini terdiri dari lima RW (Rukun Warga) dan 32 RT (Rukun Tetangga).

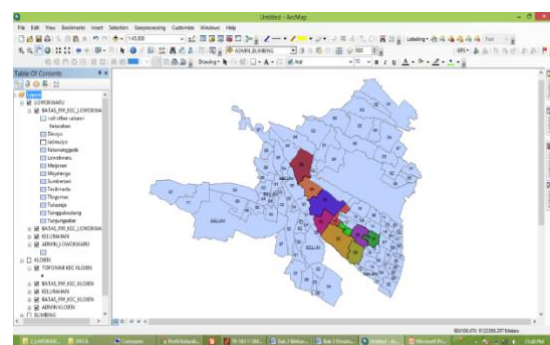


Gambar 19. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Ketawanggede

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Ketawanggede terdapat pengurangan wilayah, yaitu pada RW 01, 02, dan 03 yang masuk ke dalam wilayah RW 02 Kelurahan Dinoyo.

g. Kelurahan Jatimulyo

Kelurahan ini terdiri dari 10 RW (Rukun Warga) dan 75 RT (Rukun Tetangga).



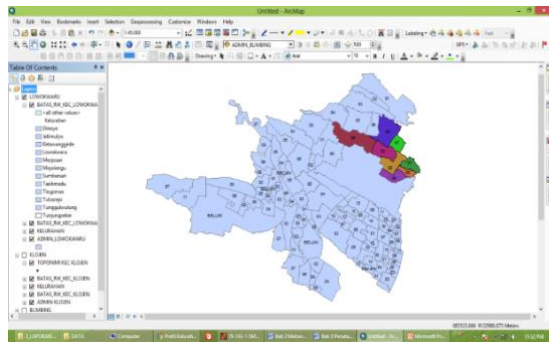
Gambar 20. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Jatimulyo

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Jatimulyo mengalami perubahan batas wilayah yaitu pada RW 01 mengalami pengurangan wilayah karena

sebagian wilayah masuk kedalam RW 08 kelurahan Jatimulyo. Pengurangan wilayah juga terjadi pada RW 07 yang sebagian wilayahnya masuk kedalam kelurahan Tulusrejo.

h. Kelurahan Tunjungsekar

Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 73 RT (Rukun Tetangga).

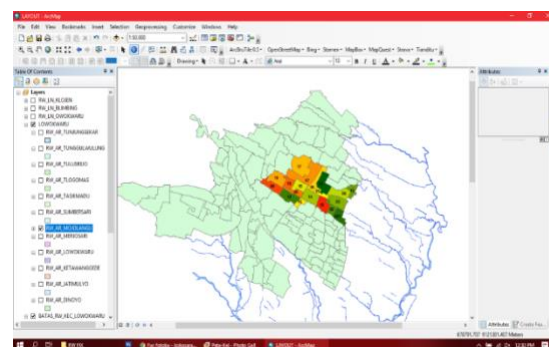


Gambar 21. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Tunjungsekar

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Tunjungsekar masih terdapat sengketa batas antara kelurahan Tunjungsekar dan kelurahan Polowijen, kecamatan Blimbing. Dalam hal ini, pemerintah maupun masyarakat setempat belum bisa menyelesaikan konflik batas tersebut, sehingga belum ada batas wilayah kelurahan yang tegas dan jelas.

i. Kelurahan Mojolangu

Kelurahan ini terdiri dari 19 RW (Rukun Warga) dan 115 RT (Rukun Tetangga).

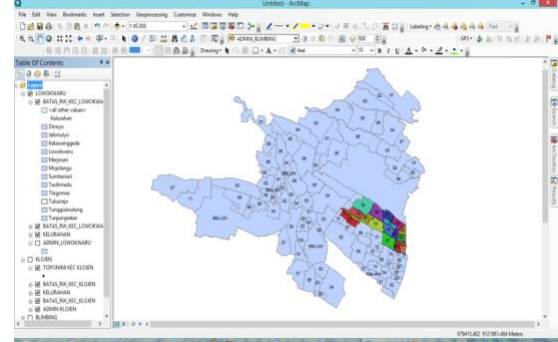


Gambar 22. Batas Pemetaan Kelurahan Mojolangu

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Mojolangu terdapat pengurangan wilayah pada RW 01 yang masuk kedalam kelurahan Purwanto RW 18.

j. Kelurahan Tulusrejo

Kelurahan ini terdiri dari 16 RW (Rukun Warga) dan 74 RT (Rukun Tetangga).

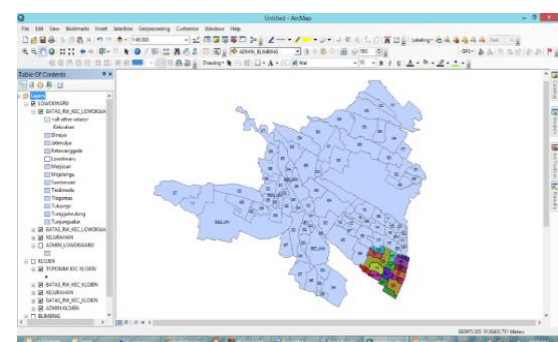


Gambar 23. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Tulusrejo

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada Kelurahan Tulusrejo mengalami penambahan batas wilayah yaitu dari wilayah Kelurahan Jatimulyo RW 07 dan penambahan dari kelurahan Purwanto masuk ke kelurahan Tulusrejo RW 02.

k. Kelurahan Lowokwaru

Kelurahan ini terdiri dari 15 RW (Rukun Warga) dan 104 RT (Rukun Tetangga).



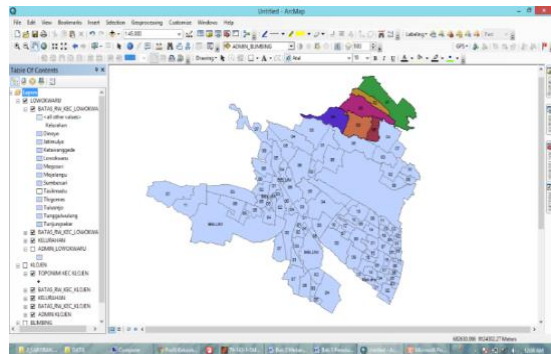
Gambar 24. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Lowokwaru

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada

kelurahan Lowokwaru tidak ada perubahan batas wilayah.

1. Kelurahan Tasikmadu

Kelurahan ini terdiri dari enam RW (Rukun Warga) dan 31 RT (Rukun Tetangga).

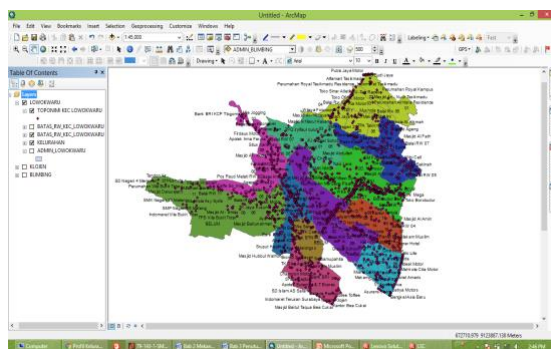


Gambar 25. Batas Pemetaan Partisipatif Kelurahan Tasikmadu

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Tasikmadu tidak ada perubahan batas wilayah.

2. Menandai Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Toponimi) Kecamatan Lowokwaru

Kegiatan survei toponimi ini bersifat detail dan dilakukan untuk mendapatkan berbagai dukungan data dan informasi yang akurat secara langsung di lokasi pekerjaan. Data titik (toponimi) dapat mewakili simbol-simbol buatan manusia seperti fasilitas social, umum, Olahraga, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan lain-lain. Berikut ini adalah hasil dari survey toponimi di Kecamatan Lowokwaru:



Gambar 26. Hasil Survey Toponimi Kecamatan Lowokwaru

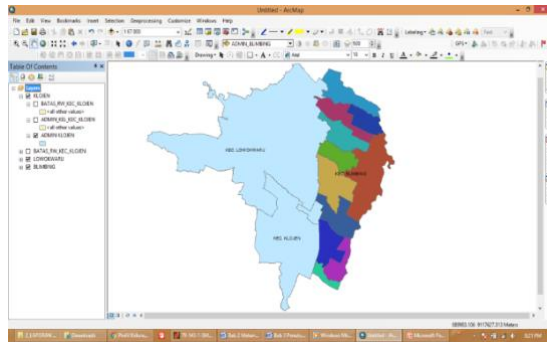
Pada tabel di bawah ini adalah jumlah point pada masing-masing kelurahan di kecamatan Lowokwaru, jumlah titik toponimi terbanyak terdapat di kelurahan Mojolangu yaitu 263 titik sedangkan yang paling sedikit di kelurahan Ketawanggede yaitu 44 titik. Jumlah keseluruhan titik toponimi di kecamatan ini yaitu 1255 titik.

Tabel 2. Jumlah Titik Toponimi Kecamatan Lowokwaru

No	Kelurahan	Jumlah Point Toponimi
1	Dinoyo	102
2	Jatimulyo	141
3	Ketawanggede	44
4	Lowokwaru	101
5	Merjosari	88
6	Mojolangu	263
7	Sumbersari	85
8	Tasikmadu	107
9	Tlogomas	104
10	Tulusrejo	53
11	Tunggulwulung	62
12	Tunjungsekar	105
Jumlah		1255

C. Kecamatan Blimbing

Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang terletak di bagian utara wilayah Kota Malang. Blimbing merupakan satu dari tiga kecamatan tertua di wilayah Kota Malang sejak ditetapkan menjadi Kotapraja. Kecamatan Blimbing bisa dibilang merupakan pintu masuk menuju Kota Malang dari sebelah utara. Saat ini, Kecamatan Blimbing memiliki total 11 kelurahan, 127 RW dan 923 RT. Secara administratif, di sebelah utara Kecamatan Blimbing berbatasan langsung dengan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sementara di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sedangkan di sebelah selatan Kecamatan Blimbing berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Lalu, di sebelah barat, Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Lowokwaru.



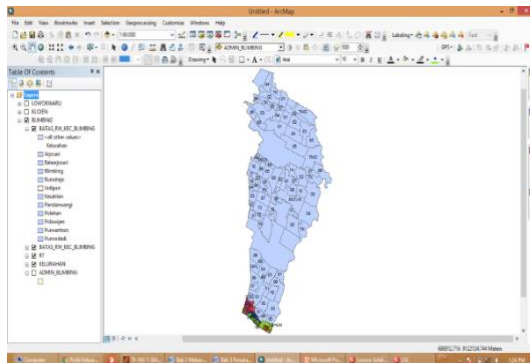
Gambar 27. Hasil Pemetaan Partisipatif Kecamatan Blimbing

Hasil dari survey lapangan pada kecamatan Blimbing terdapat perubahan batas wilayah di beberapa kelurahan, diantaranya perubahan wilayah di Kelurahan Polowijen, Purwantoro, Tunjungsekar dan Bunulrejo.

1. Pemetaan Batas Wilayah

a. Kelurahan Jodipan

Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 86 RT (Rukun Tetangga).

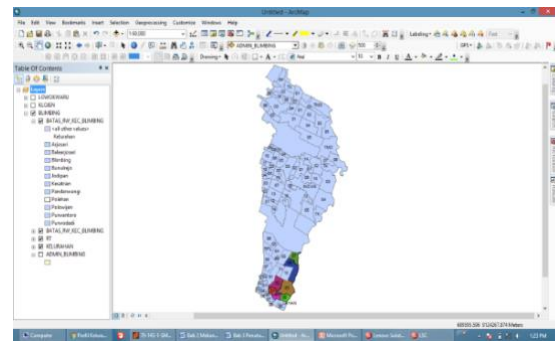


Gambar 28. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Jodipan

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Jodipan tidak ada perubahan batas wilayah.

b. Kelurahan Polehan

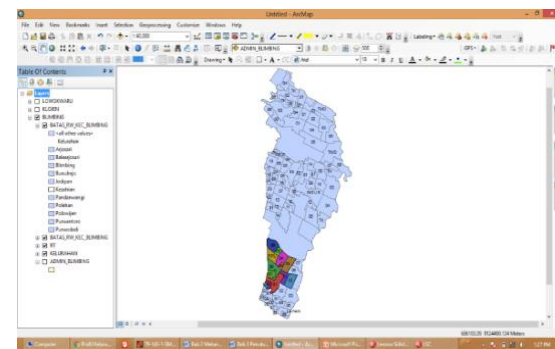
Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 74 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Polehan tidak ada perubahan batas wilayah.



Gambar 29. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Polehan

c. Kelurahan Kesatrian

Kelurahan ini terdiri dari 12 RW (Rukun Warga) dan 70 RT (Rukun Tetangga).



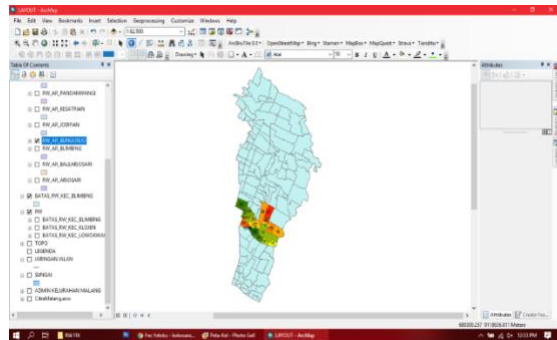
Gambar 30. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Kesatrian

Pada kelurahan ini, tim survey belum bisa memasuki wilayah pemetaan dikarenakan terdapat penolakan, banyaknya kawasan militer menjadi salah satu penyebab penolakan tersebut. Dibutuhkan surat ijin khusus yang ditujukan kepada masing-masing kawasan yang berhubungan dengan kemiliteran.

d. Kelurahan Bunulrejo

Kelurahan ini terdiri dari 21 RW (Rukun Warga) dan 146 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada Kelurahan Bunulrejo mengalami perluasan wilayah dari sebelumnya, secara administratif mengalami perluasan wilayah yang bertambah dari sebagian wilayah Kelurahan Pandanwangi dan

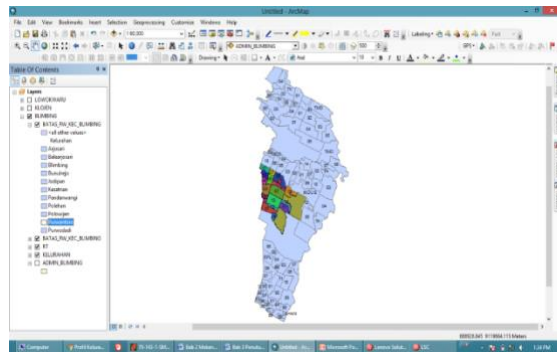
Purwanto RW 15 yang masuk kedalam kelurahan Bunulrejo RW 03.



Gambar 31. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Bunulrejo

e. Kelurahan Purwanto

Kelurahan ini terdiri dari 24 RW (Rukun Warga) dan 156 RT (Rukun Tetangga).

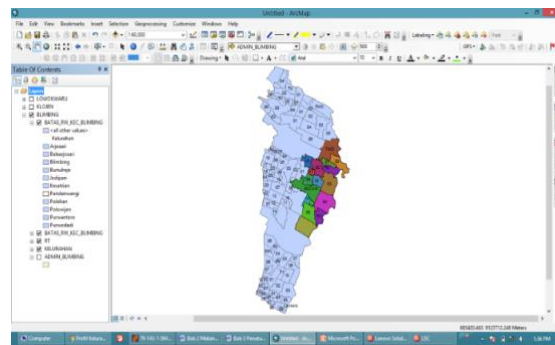


Gambar 32. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Purwanto

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada Kelurahan Purwanto mengalami penguangan wilayah dari sebelumnya yaitu pada wilayah RW 15 masuk ke dalam kelurahan Bunulrejo RW 03.

f. Kelurahan Pandanwangi

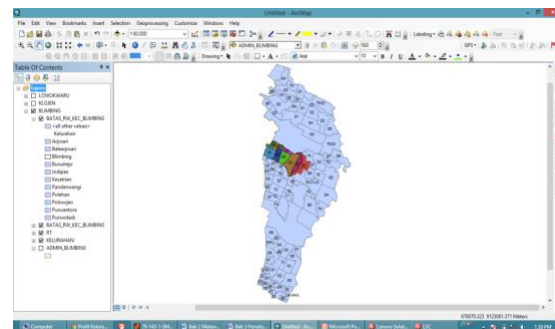
Kelurahan ini terdiri dari 14 RW (Rukun Warga) dan 126 RT (Rukun Tetangga). Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Pandawangi tidak ada perubahan batas wilayah.



Gambar 33. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Pandanwangi

g. Kelurahan Blimbing

Kelurahan ini terdiri dari 10 RW (Rukun Warga) dan 55 RT (Rukun Tetangga).

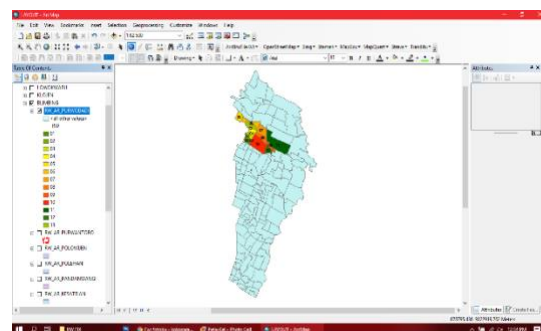


Gambar 34. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Blimbing

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Blimbing tidak ada perubahan batas wilayah.

h. Kelurahan Purwodadi

Kelurahan ini terdiri dari 13 RW (Rukun Warga) dan 94 RT (Rukun Tetangga).

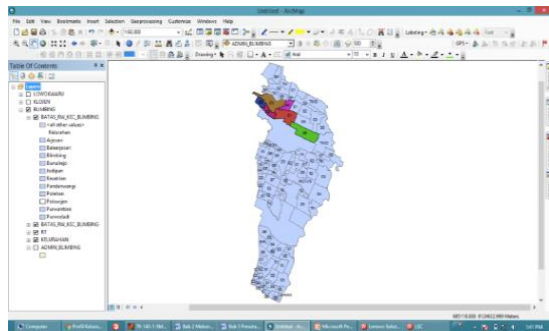


Gambar 35. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Purwodadi

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Purwodadi tidak ada perubahan batas wilayah.

i. Kelurahan Polowijen

Kelurahan ini terdiri dari delapan RW (Rukun Warga) dan 38 RT (Rukun Tetangga).

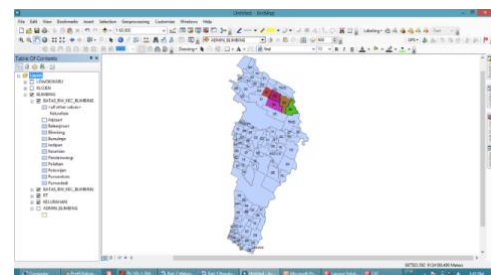


Gambar 36. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Polowijen

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Polowijen masih terdapat sengketa batas antara kelurahan Polowijen dan kelurahan Tunjungsekar. Dalam hal ini, pemerintah maupun masyarakat setempat belum bisa menyelesaikan konflik batas tersebut, sehingga belum ada batas wilayah kelurahan yang tegas dan jelas. Kemudian, pada RW 01 mengalami perluasan wilayah, dikarenakan ada penambahan wilayah dari kelurahan Arjosari RW 04.

j. Kelurahan Arjosari

Kelurahan ini terdiri dari lima RW (Rukun Warga) dan 34 RT (Rukun Tetangga).

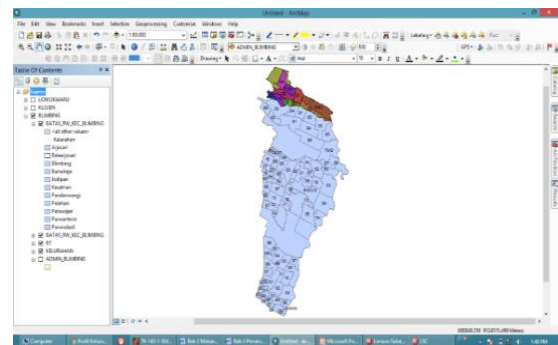


Gambar 37. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Arjosari

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Arjosari terdapat pengurangan wilayah, yaitu sebagian wilayah pada RW 04 masuk kedalam kelurahan Polowijen RW 01.

k. Kelurahan Balearjosari

Kelurahan ini terdiri dari tujuh RW (Rukun Warga) dan 44 RT (Rukun Tetangga).

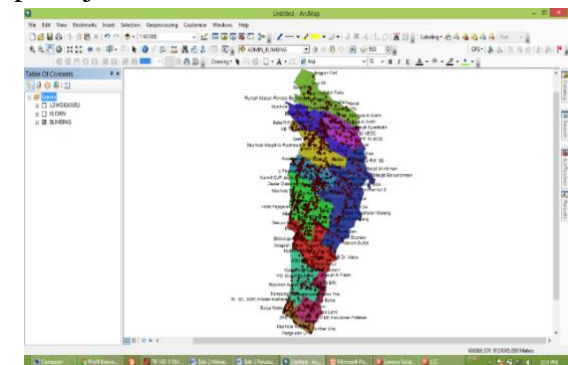


Gambar 38. Hasil Pemetaan Partisipatif Kelurahan Balearjosari

Hasil dari survey lapangan dan asistensi ke kantor kelurahan bahwa pada kelurahan Balearjosari tidak ada perubahan batas wilayah.

2. Menandai Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Toponimi) Kecamatan Blimbing

Kegiatan survei toponimi ini bersifat detail dan dilakukan untuk mendapatkan berbagai dukungan data dan informasi yang akurat secara langsung di lokasi pekerjaan.



Gambar 39. Hasil Survey Toponimi Kecamatan Blimbing

Data titik (toponimi) dapat mewakili symbol-symbol buatan manusia seperti fasilitas social, umum, olahraga, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan lain-lain. Berikut ini adalah hasil dari survey toponimi di Kecamatan Blimbing:

Pada tabel di bawah ini adalah jumlah point pada masing-masing kelurahan di kecamatan Blimbing, jumlah titik toponimi terbanyak terdapat di kelurahan Purwantoro yaitu 187 titik sedangkan yang paling sedikit di kelurahan Balearjosari yaitu 40 titik. Jumlah keseluruhan titik toponimi di kecamatan ini yaitu 1018 titik.

Tabel 3. Jumlah Titik Toponimi Kecamatan Blimbing

No	Kelurahan	Jumlah Point Toponimi
1	Arjosari	67
2	Balearjosari	40
3	Blimbing	170
4	Bunulrejo	129
5	Jodipan	44
6	Kesatrian	55
7	Pandanwangi	119
8	Polehan	54
9	Polowijen	59
10	Purwantoro	187
11	Purwodadi	94
Jumlah		1018

Pemetaan partisipatif yang dilakukan di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru terlaksana dengan baik. Pada kegiatan survey lapangan untuk mengakuisi dan mengenali batas wilayah di masing-masing Kecamatan dilakukan tanpa kendala. Hasil pemetaan secara parsitipatif dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya batas-batas wilayah kecamatan maupun kelurahan, sehingga dapat mengurangi konflik mengenai batas wilayah di antara masyarakat.

KESIMPULAN

Secara umum kegiatan pemetaan partisipatif di tiga Kecamatan yaitu Keca-

matan Klojen, Blimbing dan Lowokwaru sudah terlaksana dengan baik terutama kegiatan survei lapangan untuk mengaku- isisi dan mengenali batas wilayah di masing-masing kecamatan. Hasil akhir yang diperoleh dari kegiatan ini adalah berupa peta wilayah Kecamatan Klojen, Blimbing dan Lowokwaru hasil pemetaan secara partisipatif. Lebih dari itu kegiatan ini juga mampu membangun pemahaman bersama masyarakat mengenai arti penting batas wilayah kecamatan maupun keluraha- n, sehinga diharapkan mampu membend- ung adanya konflik horisontal yang di- sebabkan oleh perselisihan batas wilayah.

1. Hasil penggambaran batas wilayah, yang meliputi batas wilayah RT, batas wilayah RW, dan batas wilayah. Ada beberapa batas yang mengalami perub- ahan yang cukup signifikan kelura- han pada masing-masing kecamatan pada tiap kecamatan.
2. Hasil penggambaran bangunan fasilitas umum (fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasili- tas olahraga, fasilitas sosial budaya, dan fasilitas peribadatan);
3. Adanya penambahan nama tempat/ toponimi pada masing-masing Keca- matan. Kecamatan Klojen memiliki jumlah keseluruhan titik toponimi 1201 titik. Kecamatan Lowokwaru memiliki jumlah titik toponimi 1255 titik. Kecamatan Blimbing memiliki jumlah titik toponimi 1018 titik.
4. Pemetaan partisipatif dapat berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi konflik dan menyelesaikan konflik mengenai batas wilayah atau tentang pemanfaatan sumber daya alam. Na- mun proses ini harus direncanakan dan didampingi dengan baik karena proses pemetaan ini dapat juga digunakan oleh kelompok masyarakat sebagai kesem- patan untuk mendukung kepentingan mereka saja sehingga dapat menimbulkan konflik baru diantara warga ma- syarakat.

REKOMENDASI

1. Menyesuaikan kembali data yang ada dengan data hasil survey lapangan tahun 2018, dikarenakan banyaknya perubahan, baik perubahan batas wilayah dan meningkatnya perkembangan fasilitas umum secara signifikan;
2. Data batas Kelurahan yang di dapat dari data yang ada sebelumnya (Peta RDTR) masih perlu perbaikan;
3. Meningkatkan sosialisasi terhadap lembaga-lembaga, instansi pemerintahan dan masyarakat mengenai pemetaan partisipatif, yang bertujuan untuk mengurangi konflik akibat ketidakjelasan batas wilayah;
4. Terus melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait pemetaan partisipatif dan instansi pemerintahan yang bersangkutan, apabila terdapat perubahan dan updating data batas wilayah dapat langsung diperbaharui.

Bogor: Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB.

DAFTAR PUSTAKA

- Flavelle, A. 2001. *Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat, Panduan Membuat Peta Komunitas dan Tanah Adat*. Bogor: JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif).
- Hapsari, H., & Cahyono, A. B. 2014. Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal of Geodesy and Goemoatic*. Volume 10, Nomor 1, Halaman 99-103. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Hidayat, R., dkk. 2005. *Seri Panduan Pemetaan Partisipatif*. Bandung: Garis Pergerakan.
- Prihandito, A. 1989. *Kartografi*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Wibowo, A. 2009. *Pemetaan High Conservation Value Area's (HCVA'S) Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis: Studi Kasus: Kebun Kertowono Bagian Kajaran PTPN XII Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur*.

[Halaman Kosong]